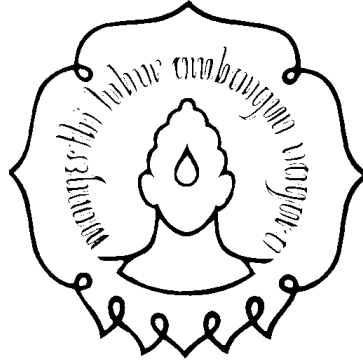


**TELAAH KRITIS POTENSI MUNCULNYA FENOMENA *HOMO SACER*
PADA KETIADAAN BATASAN WAKTU DALAM PROSES PENYIDIKAN**



Penulisan Hukum
(Skripsi)

**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Syarat-syarat Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh
ANDINI AYU PANGESTU
NIM. E0015042

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum
(Skripsi)

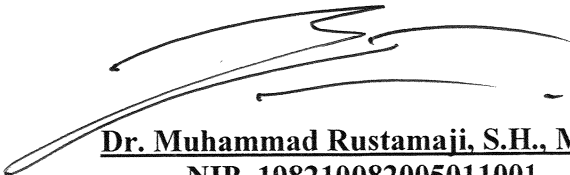
**TELAAH KRITIS POTENSI MUNCULNYA FENOMENA *HOMO SACER*
PADA KETIADAAN BATASAN WAKTU DALAM PROSES PENYIDIKAN**

Oleh
ANDINI AYU PANGESTU
NIM. E0015042

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 29 April 2019

Pembimbing Skripsi



Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H.
NIP. 198210082005011001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**TELAAH KRITIS POTENSI MUNCULNYA FENOMENA *HOMO SACER*
PADA KETIADAAN BATASAN WAKTU DALAM PROSES PENYIDIKAN**

**ANDINI AYU PANGESTU
NIM. E0015042**

**Telah diterima dan dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 14 Mei 2019

DEWAN PENGUJI

1. **Edy Herdyanto, S.H., M.H.** :
NIP. 195706291985031002
Ketua
2. **Bambang Santoso, S.H., M.Hum.** :
NIP. 196202091989031001
Sekretaris
3. **Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H.** :
NIP. 198210082005011001
Anggota

**Mengetahui,
Dekan**



Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.
NIP. 197210082005012001

SURAT PERNYATAAN

Nama : Andini Ayu Pangestu
NIM : E0015042

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :
TELAAH KRITIS POTENSI MUNCULNYA FENOMENA *HOMO SACER*
PADA KETIADAAN BATASAN WAKTU DALAM PROSES PENYIDIKAN
adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 29 April 2019
Yang Membuat Pernyataan,



Andini Ayu Pangestu
NIM. E0015042

ABSTRAK

Andini Ayu Pangestu. E0015042. 2019. TELAAH KRITIS POTENSI MUNCULNYA FENOMENA *HOMO SACER* PADA KETIADAAN BATASAN WAKTU DALAM PROSES PENYIDIKAN. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Homo Sacer berasal dari bahasa Latin, kata homo yang berarti “manusia” dan kata sacer yang berarti “suci dan terkutuk” atau dalam hukum Romawi disebut sebagai *hominus sacri* yang berarti mereka yang boleh dibunuh tanpa pembunuh yang dianggap sebagai pembunuh namun tidak boleh dikorbankan dalam ritual keagamaan, dengan demikian pada satu sisi mereka berada dalam ruang lingkup kedaulatan, namun pada sisi lain disingkirkan karena boleh untuk dibunuh tanpa sanksi pembunuhan. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui potensi munculnya fenomena *homo sacer* ketika batasan waktu proses penyidikan tidak ada. Tujuan yang lain yaitu untuk mengetahui kondisi ideal atas permasalahan munculnya *homo sacer* dalam proses penyidikan. Penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan sumber bahan hukum, baik berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik analisis silogisme deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sangat mungkin muncul fenomena *homo sacer* ketika tidak ada batasan waktu dalam proses penyidikan dan kondisi ideal atas permasalahan munculnya fenomena *homo sacer* dalam proses penyidikan adalah dengan memberikan batasan waktu dalam proses penyidikannya.

Kata kunci: *homo sacer*, proses penyidikan, hak asasi manusia

ABSTRACT

Andini Ayu Pangestu. E0015042. 2019. STUDY OF CRITICAL POTENTIAL FOR THE EMERGENCE OF HOMO SACER PHENOMENON IN THE LACK OF LIMITATION OF TIME IN THE INVESTIGATION PROCESS. Legal Writing. Law Faculty of Sebelas Maret University.

Homo Sacer comes from Latin, said homo which means "human" and the word sacer which means "holy and damned" or in Roman law called hominus sacri which means those who may be killed without murderers who are considered murderers but must not be sacrificed in rituals religious, thus on the one hand they are within the scope of sovereignty, but on the other hand are excluded because they may be killed without sanctions of murder. This legal research aims to determine the potential for the emergence of the homo sacer phenomenon when there is no time limit for the investigation process. Another aims is to find out the ideal conditions for the problem of the emergence of homo sacre in the investigation process. This legal research belonged to a normative legal research that was prescriptive using sources of legal material, either primary or secondary legal materials. Technique of collecting legal materials in this research is library research. The legal material analysis technique uses deductive syllogistic analysis techniques. Based on the results of the study it can be concluded that it is very possible to emergence the homo sacer phenomenon when there is no time limit in the investigation process and ideal conditions for the problem of the emergence of the homo sacer phenomenon in the investigation process is to provide a time limit in the investigation process.

Keywords: homo sacer, investigation process, human rights

MOTTO

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan,
maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan),
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain,
dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”*

Q.S. Al Insyirah : 6-7

Kebanggaan terbesar kita adalah bukan tidak pernah gagal,
tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh.

Confusius

“The only time you should ever look back is to see how far you’ve come”

BTS - Butterfly

“And maybe I made mistakes yesterday, but yesterday me is still me.

Today, I am who I am with all my faults and my mistakes.

Tomorrow, maybe I might be a tiny bit wiser and that’ll be me too.

These faults and mistakes are what I am,

making up the brightest stars in the constellation of my life.

I have come to love myself for who I am and who I was and who I hope to become”

Kim Namjoon

“It’s alright, now count 1, 2, 3 and forget.

Erase all sad memories.

Hold each other’s hands and smile”

BTS - 2!3!

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati.

Ku persembahkan sepercik keberhasilan,
untuk semua orang yang punya arti dalam hidup Andini.
Baik mereka yang masih menetap ataupun yang sudah pergi.
Terima kasih telah banyak mengajarkan dalam hidup ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul “**TELAAH KRITIS POTENSI MUNCULNYA FENOMENA *HOMO SACER* PADA KETIADAAN BATASAN WAKTU DALAM PROSES PENYIDIKAN**”

Penulisan hukum (skripsi) ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dalam penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini banyak pihak-pihak yang memberikan bantuan berupa bimbingan, saran, nasehat serta dukungan baik moril maupun materiil. Oleh karena itu, penulis dengan kerendahan hati menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. **Ibu Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
2. **Bapak Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H.** selaku Pembimbing penulisan hukum (skripsi) yang telah memberikan ilmu, pengarahan dan motivasi kepada penulis;
3. **Bapak Dr. Soehartono, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret sekaligus Pembimbing Akademik penulis;
4. **Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret** yang telah memberikan penulis pengetahuan, wawasan dan pembelajaran;
5. **Staff Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret** yang telah membantu kegiatan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret;
6. Orang tua tercinta, **Ayah Slamet Supriyanto** dan **Mamah Neneng Nurhasanah** serta adik tersayang **Andika Wahyu Pangestu** yang selama ini

selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini;

7. **Deaviani Rizkinita** dan **Reni Melani**, terimakasih selalu menemani penulis dalam mengerjakan penulisan hukum (skripsi) dan selalu jadi tempat bagi penulis dalam berkeluh kesah;
8. **Keluarga Besar Moot Court Community Fakultas Hukum UNS**, terimakasih atas pengetahuan, persahabatan, pengalaman, perjuangan yang selama ini diberikan kepada penulis; dan
9. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Demikian, semoga penulisan hukum (skripsi) ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Surakarta, 29 April 2019

Penulis

Andini Ayu Pangestu

NIM. E0015042

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan Hukum	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Kerangka Teori.....	13
1. Penyidikan dan Lubang Hukum Bernama Ketiadaan Batasan Waktu dalam Pelaksanaannya.....	13
a. Pengertian Penyidikan.....	13
b. Pengertian Penyidik	15

c. Proses Penyidikan	18
d. Ketiadaan Batasan Waktu dalam Proses Penyidikan	23
2. Giorgio Agamben dan Pemikiran Manusia Tanpa Hak (<i>Homo Sacer</i>)	26
B. Kerangka Pemikiran.....	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Analisis Potensi Munculnya Fenomena <i>Homo Sacer</i> (Manusia Tanpa Hak) Ketika Batasan Waktu Penyidikan Tidak Ada.....	32
1. Manusia yang Bergeser dari <i>Bios</i> Menjadi <i>Zoe</i>	33
2. Hidup Telanjang (<i>Bare Life</i>)	36
3. <i>Zone of Indistinction</i>	39
4. <i>State of Exception</i>	41
B. Telaah Kondisi Ideal Atas Permasalahan Munculnya Fenomena <i>Homo Sacer</i> (Manusia Tanpa Hak) dalam Proses Penyidikan.....	44
BAB IV PENUTUP	53
A. Simpulan	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	56

DAFTAR GAMBAR

HALAMAN

Gambar 1. Skematik Kerangka Pemikiran.....	30
--	----

DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel 1. Jangka Waktu Penahanan	50
---------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mencermati Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai sebuah produk hukum di tahun 1980-an tampaknya terdapat banyak lubang hukum yang mulai bermunculan di era sekarang. Salah satu lubang hukum tersebut adalah ketiadaan batasan waktu dalam proses penyidikan. Hal ini merupakan permasalahan yang sangat serius terhadap nasib tersangka di dalam proses penyidikan. Ketiadaan batasan waktu ini menyebabkan seakan-akan tersangka menjadi manusia tanpa hak atau yang oleh Agamben digambarkan sebagai *homo sacer*.

Jika ditelaah lebih jauh, dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dikatakan bahwa:

“Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum”

kemudian dalam Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga diatur bahwa:

“Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada Penuntut Umum”

Berkasarkan ketentuan kedua pasal tersebut sama sekali tidak menunjukkan kapan batasan waktu proses penyidikan itu berakhir, kecuali ketentuan dalam Pasal 110 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa:

“Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada

pemberitahuan tentang hal itu dari Penuntut Umum kepada Penyidik”

namun berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana apabila penuntut umum menganggap hasil penyidikan perlu dilengkapi maka penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum maka ketentuan limitasi waktu selama 14 (empat belas) hari tersebut tidak ada lagi.

Dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa:

- (1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada Penuntut Umum.
- (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum.
- (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut sudah jelas bahwa tersangka memiliki hak untuk segera dilakukan penyidikan agar perkaranya segera dilimpahkan kepada penuntut umum untuk selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan agar segera diadili dan dinyatakan tersangka bersalah atau tidak. Namun karena tidak adanya ketentuan batasan waktu dalam proses penyidikan maka menyebabkan munculnya potensi pelanggaran hak asasi manusia dari tersangka.

Titik krusial ini yang kemudian menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam karena hak asasi manusia bukan hanya sekedar pemenuhan hak seseorang saja tetapi hak asasi manusia merupakan hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga telah mengakomodasi hak asasi manusia yang dituangkan dalam banyak pasal-pasal sebagai hak-hak tersangka atau hak-hak terdakwa, akan tetapi dalam perjalanannya apa yang

tersurat dalam pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak dapat dihormati dengan baik oleh aparat penegak hukum khususnya pada tingkat penyidikan dan tingkat penutupan. Hal ini terbukti bahwa sekalipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah memberikan batasan dengan asas-asas yang harus dipegang teguh oleh aparat penegak hukum, antara lain seperti: 1) asas legalitas; 2) asas praduga tidak bersalah; 3) asas yang menekankan tentang hak-hak tersangka dalam memberikan keterangan secara bebas tanpa rasa takut; 4) asas untuk mendapatkan pembelaan dan bantuan hukum; dan lain-lain, akan tetapi di dalam praktiknya banyak tindakan aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana yang menyimpang akibat penggunaan kewenangan secara tidak bertanggung jawab dan tidak terkontrol. Kewenangan yang sedianya dimaksudkan untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia telah berubah menjadi alat penindas dan penyiksa warga negara yang disangka melakukan tindak pidana (M. Sofyan Lubis, 2010:66).

Oleh karenanya berdasarkan pemaparan tersebut, penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih dalam penulisan hukum dengan judul **“Telaah Kritis Potensi Munculnya Fenomena *Homo Sacer* pada Ketidadaan Batasan Waktu dalam Proses Penyidikan”**. Apabila penulisan hukum ini tidak dilakukan maka ketidadaan batasan waktu dalam proses penyidikan akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tersangka serta menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia bagi tersangka.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan dikaji lebih dalam dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi *homo sacer* muncul ketika batasan waktu proses penyidikan tidak ada?
2. Bagaimana kondisi ideal atas permasalahan munculnya *homo sacer* dalam proses penyidikan?

C. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian mempunyai tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Tujuan tersebut diperlukan untuk memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan penelitian sesuai dengan maksud dari penelitian. Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penulisan hukum ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan objektif dan tujuan subjektif. Tujuan objektif berasal dari tujuan penelitian itu sendiri sedangkan tujuan subjektif merupakan tujuan yang berasal dari penulis. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif

- a. Mengetahui potensi munculnya *homo sacer* ketika batasan waktu proses penyidikan tidak ada.
- b. Mengetahui kondisi ideal atas permasalahan munculnya *homo sacer* dalam proses penyidikan

2. Tujuan Subjektif

- a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun penulisan hukum (skripsi) agar dapat memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- b. Menambah ilmu, wawasan dan pengetahuan dalam memperluas pemahaman serta kemampuan analisis penulis mengenai aspek hukum di dalam teori dan praktek, khususnya dalam bidang hukum acara pidana.

D. Manfaat Penelitian

Pada dasarnya, nilai dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang diambil dari hasil penelitian tersebut. Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu hukum baik secara teoretis maupun praktis. Manfaat yang hendak dicapai dalam penulisan hukum ini ada dua, yaitu manfaat teoretis yang bertalian dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan manfaat praktis yang bertalian dengan pemecahan masalah itu sendiri. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan di bidang hukum acara pidana pada khususnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pemahaman, pengkajian, pengembangan, tambahan referensi ataupun literatur dalam pengkajian terhadap penelitian-penelitian sejenis pada tahap selanjutnya

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti oleh penulis serta menjadi sarana dalam mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- b. Membantu memberikan masukan dan sumbangan pemikiran terhadap pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang menjadi pokok bahasan.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Dalam melakukan penelitian hukum dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan hukum yang ada, melakukan penalaran hukum yang dihadapi untuk kemudian memberikan pemecahan atas permasalahan tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2014:60). Untuk mencapai tujuan dari penelitian hukum, maka diperlukan metode-metode yang tepat untuk menghasilkan argumentasi terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum (*legal research*) adalah suatu proses untuk menentukan kebenaran koherensi, yaitu menentukan apakah aturan hukum yang ada sudah sesuai dengan norma hukum, apakah norma hukum yang berupa perintah dan larangan itu sudah sesuai dengan prinsip hukum dan apakah tindakan seseorang sudah sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014:47).

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian ini adalah metode penelitian hukum *doctrinal* atau normatif. Peter Mahmud Marzuki menerangkan bahwa semua penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) adalah selalu normatif. Tipe penelitian seperti ini harus dinyatakan dalam suatu tulisan, cukup dikemukakan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum. Dengan pernyataan demikian sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif. Hanya saja pendekatan dan bahan-bahan hukum yang digunakan harus dikemukakan (Peter Mahmud Marzuki, 2014:55-56).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah preskriptif atau terapan. Sifat penelitian hukum ini tentunya sejalan dengan sifat dari ilmu hukum itu sendiri. Ilmu hukum mempunyai sifat sebagai ilmu yang preskriptif atau terapan bukan bersifat deskriptif seperti ilmu sosial. Sifat preskriptif keilmuan hukum merupakan sesuatu yang substansial di dalam ilmu hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014:22).

Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, konsep-konsep hukum, norma-norma hukum, kaidah-kaidah hukum, validitas aturan hukum dan nilai-nilai keadilan. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum dapat dilakukan dengan berbagai macam pendekatan. Pendekatan tersebut digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek terhadap permasalahan yang coba dikaji dan diteliti untuk dicari jawabannya. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam sebuah penelitian hukum terdapat 5 (lima) macam pendekatan, yaitu: Pendekatan undang-undang (*statute approach*); Pendekatan kasus (*case approach*); Pendekatan historis (*historical approach*); Pendekatan komparatif (*comparative approach*); dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ditujukan kepada pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam pendekatan konseptual (*conceptual approach*), peneliti mengkaji pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sehingga peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-

pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pandangan akan doktrin tersebut digunakan sebagai dasar dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014:93-94).

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber penelitian hukum dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer bersifat autoritatif yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder berupa semua dokumen publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2014:181).

Sumber hukum yang akan penulis gunakan dalam penulisan hukum ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain:

a. Bahan hukum primer, meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian

Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- 6) Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/A/JA/02/2009 tentang Meminimalisir Bolak Baliknya Perkara Antara Penyidik dan Penuntut Umum.

b. Bahan hukum sekunder, meliputi:

- 1) Buku-buku;
- 2) Jurnal-jurnal hukum;
- 3) Artikel; dan
- 4) Bahan dari internet serta sumber-sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum bertujuan untuk memperoleh bahan hukum yang digunakan guna menjawab permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*). Studi dokumen dan studi kepustakaan merupakan pengumpulan bahan hukum dengan cara mempelajari, membaca, menelaah, dan mencatat buku-buku, literatur, penelitian ilmiah terdahulu, peraturan perundang-undangan, serta artikel-artikel penting yang berkaitan erat dengan permasalahan yang dibahas pada penyusunan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan tahapan yang dilakukan penulis dalam mengklarifikasi dan menguraikan bahan hukum yang diperoleh untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian hukum ini bersifat kualitatif atau non statistik. Penelitian ini menggunakan teknik analisis silogisme deduksi yang berpangkal dari

pengajuan premis mayor dan premis minor. Premis mayor tersebut merupakan penarikan suatu aturan hukum sedangkan premis minor merupakan fakta hukum yang dapat ditemukan. Kemudian dari kedua premis tersebut dapat ditarik kesimpulan atau *conclusion* (Peter Mahmud Marzuki, 2014:89-90).

F. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan hukum bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai keseluruhan sistematika penulisan hukum serta mempermudah pemahaman mengenai isi penulisan hukum, maka sistematika penulisan dibagi menjadi tiga bagian. Adapun sistematika dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Pada bagian awal skripsi ini terdiri atas halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji halaman pernyataan, abstrak, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan daftar tabel.

2. Bagian Isi Skripsi

Pada bagian isi skripsi terdapat 4 (empat) bab yaitu bab pendahuluan, bab tinjauan pustaka, bab hasil penelitian dan pembahasan serta bab penutup. Adapun penjabarannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat dua sub bab yaitu kerangka

teori dan kerangka pemikiran.

A. Kerangka Teori

Kerangka teori berisikan tinjauan tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian sehingga dapat menjadi landasan dan memberikan penjelasan secara teoretik mengenai permasalahan yang penulis teliti. Tinjauan-tinjauan tersebut yaitu:

1. Penyidikan dan Lubang Hukum yang bernama Ketiadaan Batasan Waktu dalam Pelaksanaannya.
2. Giorgio Agamben dan Pemikiran Manusia Tanpa Hak (*Homo Sacer*).

B. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menjelaskan alur berpikir penulis yang disajikan dalam bentuk bagan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap pokok permasalahan yang ada dalam penulisan hukum (skripsi) ini

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Telaah Kritis Potensi Munculnya Fenomena *Homo Sacer* pada Ketiadaan Batasan Waktu dalam Proses Penyidikan ke dalam 2 (dua) sub bab yaitu :

- #### A. Analisis Potensi Munculnya Fenomena *Homo Sacer* (Manusia Tanpa Hak) Ketika Batasan Waktu Penyidikan Tidak Ada

B. Telaah Kondisi Ideal Atas Permasalahan
Munculnya Fenomena *Homo Sacer* (Manusia
Tanpa Hak) dalam Proses Penyidikan

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menguraikan simpulan dan
saran yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka. Isi daftar pustaka
merupakan sumber literatur yang digunakan dalam penulisan hukum
(skripsi) ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Penyidikan dan Lubang Hukum Bernama Ketiadaan Batasan Waktu dalam Pelaksanaannya

a. Pengertian Penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia). Menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum (Andi Hamzah, 2016:120).

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana yang terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan. Pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Tindakan penyidikan merupakan cara untuk mengumpulkan bukti-bukti awal untuk mencari tersangka yang diduga melakukan tindak pidana dan saksi-saksi yang mengetahui tentang tindak pidana tersebut. Tujuan penyidikan adalah membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan serta memberikan pembuktian-pembuktian mengenai tindak pidana yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun

keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu (M. Husein Harun, 1991:58).

Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam rumusan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- 1) Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- 2) Penyidik dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- 3) Penyidikan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- 4) Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya (Adami Chazawi, 2005:380-381).

Pada batasan pengertian penyidikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dengan konkret dan faktual dimensi penyidikan dimulai ketika

terjadinya tindak pidana sehingga melalui proses penyidikan hendaknya diperoleh keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut (Lilik Mulyadi, 2007:55):

- 1) Tindak pidana yang telah dilakukan.
- 2) Tempat dan waktu tindak pidana dilakukan.
- 3) Cara tindak pidana dilakukan.
- 4) Dengan alat apa tindak pidana dilakukan.
- 5) Latar belakang sampai tindak pidana dilakukan.
- 6) Siapa pelaku tindak pidana.

b. Pengertian Penyidik

Penyidik menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana lebih jauh mengatur tentang penyidik dan memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat yang dapat melakukan penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik dari pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Selain diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terdapat lagi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik (M. Yahya Harahap, 2016:110).

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ditegaskan orang yang berhak ditunjuk sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan seorang

pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

1) Pejabat Penyidik Polisi

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain sebagai berikut:

a) Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat penyidik penuh harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

- (1) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- (2) Atau yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;

(3) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

b) Penyidik Pembantu

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah (Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya dan Hasan Madani, 2004:19). Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai penyidik pembantu diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu yaitu (M. Yahya Harahap, 2016:111-112):

- (1) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- (2) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
- (3) Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik pegawai negeri sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan

pada salah satu pasal (M. Yahya Harahap, 2016:113). Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebut dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa:

“Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”.

c. Proses Penyidikan

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dapat diketahui bahwa proses penyidikan yang dilakukan penyidik dapat digambarkan sebagai berikut:

1) Diawali dengan Adanya Bahan Masukkan Tindak Pidana

Sumber bahan masukan suatu tindak pidana ke dalam proses peradilan pidana berupa pengetahuan dan persangkaan telah terjadinya suatu perbuatan pidana yang dapat diperoleh penyidik dari berbagai sumber yaitu: a) Tertangkap Tangan; b) Laporan; c) Pengaduan; dan d) Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya tindak pidana.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyidik mempunyai kewajiban untuk segera melakukan tindakan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan

tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga sebagai suatu perbuatan pidana.

2) Melakukan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian

Tempat kejadian adalah tempat yang mana telah dilakukan suatu tindak pidana. Menurut P.A.F. Lamintang yang dimaksud dengan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian adalah melakukan segala macam tindakan yang oleh penyidik telah dipandang perlu untuk menyelamatkan nyawa korban atau harta kekayaan orang, menangkap pelakunya apabila pelaku tersebut masih berada dalam jangkauan penyidik, menutup tempat kejadian bagi siapa pun yang kehadirannya tidak diperlukan untuk menyelamatkan nyawa korban, menemukan dan mengumpulkan atau mengambil barang-barang bukti serta berkas-berkas yang dapat membantu penyidik untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk tentang identitas pelaku atau dari pelaku-pelakunya, menemukan adanya saksi-saksi yang diharapkan dapat membantu penyidik untuk memecahkan persoalan yang sedang ia hadapi dan memisahkan saksi-saksi tersebut agar mereka tidak dapat berbicara satu dengan yang lainnya (P.A.F. Lamintang, 1997:76). Pemeriksaan di tempat kejadian pada umumnya dilakukan karena terjadi delik yang mengakibatkan kematian, kejahatan seksual, pencurian dan perampokan (Andi Hamzah, 2016:126).

3) Pemanggilan dan Pemeriksaan Tersangka dan Saksi

Berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa pemanggilan dilakukan dengan:

- a) Surat panggilan yang sah (ditandatangani oleh penyidik yang berwenang) dengan menyebut pemanggilan secara jelas.

- b) Memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari pemeriksaan.

Menurut Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, orang yang dipanggil (baik tersangka maupun saksi) wajib datang dan jika tidak datang maka penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepada penyidik. Jika tidak dapat datang dengan alasan yang patut dan wajar, penyidik datang ke tempat kediamannya.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan tersangka:

- a) Tersangka didengar keterangannya tanpa adanya tekanan dari siapapun dan/atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).
- b) Sesudah ditanyakan kepada tersangka, ternyata ia menghendaki didengarnya saksi *a de charge*, maka penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut (Pasal 116 (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).
- c) Keterangan apapun yang diberikan tersangka sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik harus mencatat keterangan tersangka dalam berita acara pemeriksaan, apabila dalam pemeriksaan tersebut telah selesai dan disetujui maka berita acara pemeriksaan harus ditandatangani oleh penyidik dan tersangka (Pasal 117 ayat (2) dan Pasal 118 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

- d) Jika tersangka tidak mau membubuhkan tanda tangannya hendaklah dicatatkan ke dalam berita acara pemeriksaan dan disebutkan alasannya (Pasal 118 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).
- e) Pemeriksaan terhadap tersangka yang berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang melakukan penyidikan, dapat dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka (Pasal 119 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

Adapun tata cara pemeriksaan saksi oleh penyidik sebagai berikut:

- a) Saksi tidak disumpah kecuali dengan alasan saksi tersebut tidak dapat hadir dalam persidangan (Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).
- b) Diperiksa secara tersendiri, tapi dapat dipertemukan satu dengan lainnya (Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).
- c) Pemeriksaan dilakukan tanpa tekanan oleh siapapun, tetapi saksi harus memberikan keterangan dengan sejujurnya dan sebenarnya (Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).
- d) Keterangan dari pemeriksaan saksi dicatatkan ke dalam berita acara pemeriksaan dan jika telah selesai ditandatangani oleh penyidik dan saksi jika menyetujuinya, apabila saksi tidak mau menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut penyidik mencatatnya ke dalam berita acara dengan

menyebutkan alasan yang kuat (Pasal 118 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

- e) Saksi di luar daerah hukum penyidik, pemeriksaannya dapat diberikan terhadap penyidik di tempat kediaman saksi (Pasal 119 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

4) Melakukan Upaya Paksa yang Diperlukan

Upaya paksa adalah segala sesuatu bentuk tindakan yang dipaksakan oleh aparat penegak hukum terhadap kebebasan bergerak seseorang atau untuk memiliki ataupun menguasai suatu barang atau kemerdekaan pribadinya agar tidak mendapat gangguan terhadap pribadinya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah menentukan adanya beberapa tindakan atau upaya paksa yang dapat dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Berbagai upaya paksa tersebut diatur dalam BAB V dari Pasal 16 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu: a) Penangkapan; b) Penahanan; c) Penggeledahan badan; d) Pemasukan rumah; e) Penyitaan; dan f) Pemeriksaan Surat.

5) Pembuatan Berita Acara Penyidikan

Setelah pemeriksaan yang dipandang perlu itu cukup, maka penyidik dengan kekuatan sumpahnya membuat berita acara (Pasal 112 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) dengan persyaratan sebagai berikut:

- a) Diberi tanggal berita acara.
- b) Memuat tindak pidana yang dipersangkakan.
- c) Nama, tempat tinggal dari tersangka dan saksi.

- d) Keterangan saksi dan/atau keterangan tersangka.
- e) Catatan mengenai akta.
- f) Segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara itu pada tahap penuntutan dan pengadilan.

6) Penyerahan Berkas Perkara kepada Penuntut Umum

Apabila penyidikan telah selesai, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyerahan berkas perkara meliputi dua tahap yaitu: a) penyidik menyerahkan berkas perkara; dan b) penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum dalam hal penyidikan telah selesai.

d. Ketiadaan Batasan Waktu Dalam Proses Penyidikan

Menurut Pasal 110 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, proses penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik namun berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana apabila penuntut umum menganggap hasil penyidikan perlu dilengkapi maka penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum maka ketentuan batasan waktu selama 14 (empat belas) hari tersebut tidak ada lagi.

Menurut M. Yahya Harahap dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana banyak permasalahan

dalam rumusan pasal-pasal nya, permasalahan-permasalahan tersebut sebagai berikut (M.Yahya Harahap, 2016:14-15):

1) Perumusan yang Bersifat Elipsis

Rumusan pasal sering mengulang kata-kata atau membuang kata-kata supaya terpenuhi bentuk susunan kalimatnya. Akibat dari perumusan yang bersifat elipsis, sering memunculkan rumusan pasal-pasal yang bersifat:

- a) *Ill-defined*, tidak jelas definisi atau maknanya;
- b) *Unclear-outlined*, tidak jelas penggarisannya;
- c) *Unclear-meaning*, tidak jelas artinya;
- d) *Elusive-term*, tidak tertangkap maksudnya;
- e) *Unexpressed-word*, tidak diungkapkan kata-katanya karena dianggap sudah tercakup dalam kalimat sebelumnya;
- f) *Ambiguity*, pengertiannya ambiguitas atau “mendua”.

2) Mengandung Rumusan *Board-Term*

Rumusan *board-term* yang berarti sedemikian luasnya rumusan sehingga menimbulkan permasalahan dalam praktek. Pada hakikatnya, setiap rumusan maupun “peristilahan luas” bisa mengandung pengertian yang bersifat:

- a) *Vague-outlined*, kabur penggarisan dan standarnya;
- b) *Uncertainty*, tidak pasti artinya sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya;
- c) *Statutory expression may change with the paddage of time*, perumusan dan tujuannya dapat berubah-ubah sesuai perubahan lintasan waktu.

3) Perumusan Bercorak *Political Uncertainty*

Perumusan undang-undang tidak terlepas dari latar belakang politik yang berakibat dalam penerapannya sering dihadapkan kepada rumusan undang-undang yang bersifat:

- a) *Ambiguous-word*, kata-kata yang bersifat ambigu atau “mendua”;
- b) Rumusannya mengandung tujuan politik atau merupakan kehendak pemerintah untuk “meminimalkan” risiko perubahan hukum.

4) Perumusan *Unforseable Developments*

Rumusannya tidak mampu “menangkap” dan “meliputi” perjalanan perkembangan dan perubahan masyarakat.

5) Perumusan Yang Mengandung *Error*

Meskipun pada saat dibuat rumusannya sudah diteliti berulang-ulang, namun masih saja ada *error* yang sangat rumit dan kontroversial, antara lain:

- a) *Ill-concidered*, landasan pertimbangannya tidak rasional dan matang sehingga makna yang terkandung di dalamnya “cacat”. Jika diterapkan dapat menimbulkan akibat yang bertentangan dengan tujuan yang dikehendaki pembuat undang-undang dan kepentingan masyarakat.
- b) Perumusan pasal yang mengandung konflik dan kontroversi, baik antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya atau antara satu pasal dengan pasal lain dalam undang-undang yang bersangkutan.

Berdasarkan pandangan M. Yahya Harahap tersebut, Pasal 110 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mengandung rumusan *board-term* bersifat tidak pasti

(*uncertainty*), karena kata *melengkapi* tidak diberikan batasan waktu sehingga rumusan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan permasalahan dalam praktiknya.

Munculnya berbagai keluhan dan kritik yang ditujukan kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, melalui instrumen penafsiran telah menimbulkan *discretion* yang kurang dapat dipertanggungjawabkan. Masalah-masalah yang memerlukan pembaharuan dalam rumusan pasal di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana seperti, penyidik tidak mengembalikan berkas kepada penuntut umum dalam rangka penyempurnaan kelengkapan pemeriksaan penyidikan; penyelesaian penyidikan yang berlarut-larut; tidak mengeluarkan surat penghentian penyidikan meskipun penyidikan sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa ujung pangkal dan lain-lain.

2. Giorgio Agamben dan Pemikiran Manusia Tanpa Hak (*Homo Sacer*)

Homo Sacer berasal dari bahasa Latin, kata *homo* yang berarti “manusia” dan kata *sacer* yang berarti “suci dan terkutuk” atau dalam hukum Romawi disebut sebagai *hominus sacri* yang berarti mereka yang boleh dibunuh tanpa pembunuh yang dianggap sebagai pembunuh namun tidak boleh dikorbankan dalam ritual keagamaan. Istilah *homo sacer* memiliki dua ciri pokok yaitu impunitas atas pembunuhannya dan larangan untuk menjadikan mereka sebagai bagian dari ritual keagamaan. Dengan demikian pada satu sisi mereka berada dalam ruang lingkup kedaulatan, namun pada sisi lain disingkirkan karena boleh untuk dibunuh tanpa sanksi pembunuhan dan larangan untuk pengorbanan dalam ritual keagamaan atau dengan singkatnya mereka yang dibuang tersebut tidak boleh disucikan (Giorgio Agamben, 1998:72). Pada masyarakat Yunani kuno, kata “hidup” ditemukan dalam artian yang berbeda; *zoe* dan *bios*.

Arti kata *zoe* menunjukkan hidup “sebagaimana mestinya”, hidup untuk bertahan hidup selayaknya yang dilakukan oleh makhluk hidup pada umumnya. Sedangkan *bios* menunjukkan cara hidup yang layak oleh individu maupun kelompok, yang berarti hidup publik sebagaimana terdapat dalam masyarakat polis (Giorgio Agamben, 1998:1). Lazimnya hidup “natural” dari para *zoe* terpisah dari *bios* yang merupakan hidup yang penuh. Hanya saja, letak hubungan antar *bios-zoe* dalam relasinya dengan kedaulatan adalah bahwa pada titik inilah status kepenuhan manusia (*bios*) dapat dihilangkan, membuang mereka pada kehidupan apa adanya (*mere life*) menjadi manusia telanjang (*bare life*) yang hidup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya semata dan yang nyawanya sewaktu-waktu dapat dihilangkan (*zoe*) (Rian Adhivira Prabowo, 2015:30).

Bios yang merupakan bagian dari masyarakat politik dengan hak publik yang penuh dihadapkan dengan *zoe* yang merupakan manusia dengan kualitas kemanusiaannya berupa pemenuhan kebutuhan biologi semata. Maka apa yang disebut sebagai *homo sacer* adalah degradasi kualitas manusia dari *bios* kepada *zoe*, dari hidup yang penuh menjadi hidup telanjang, degradasi ini menunjukkan pula posisi hukum dan hidup, bahwa pada satu sisi hukum dengan sisi punitifnya berlaku, ditegakkan yang dalam penegakannya tersebut relevansi antara tindakan dan hukum sesungguhnya tidak lagi ada, secara politik barangkali tindakan tersebut legitim dan legal, namun jangkar pendasaran dari tindakan tersebut berlaku dengan menyingkirkan yang bukan anggota dengan satu marka tanda tertentu yang membedakan dari komunitas dalam *bios*, ketiadaan identitas dalam batas identitas inilah yang merupakan hidup telanjang (*bare life*), reduksi kepenuhan hidup *bios* kedalam *zoe*, yang dapat dibunuh tanpa diganjar hukuman (John Lechte dan Saul Newman,

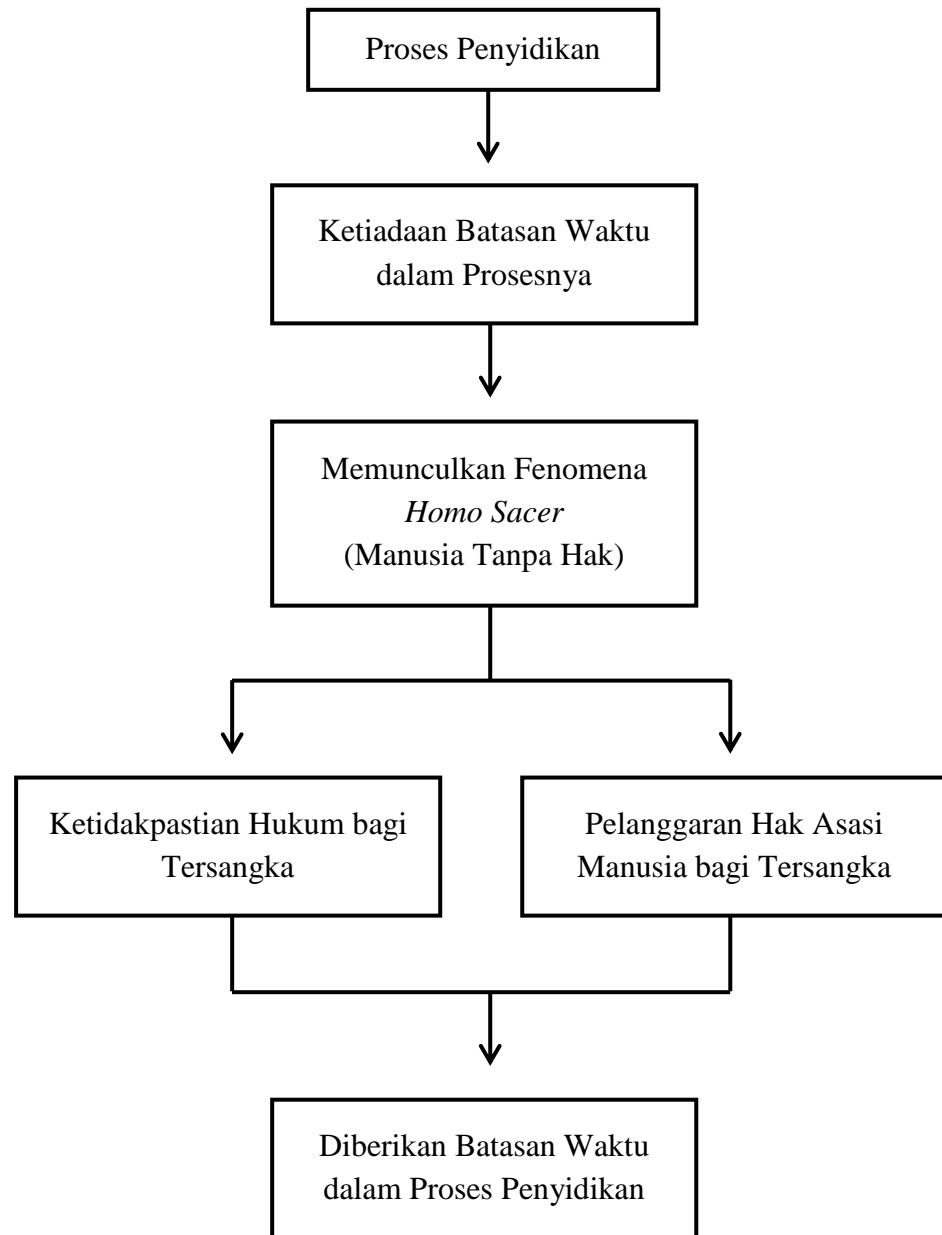
2013:63). Agamben menarik batas keduanya lebih jauh lagi, momen-momen penciptaan manusia telanjang tersebutlah yang merupakan pondasi tersembunyi dari kedaulatan atau dengan kata lain apa yang disebut sebagai kedaulatan itu sendiri adalah berdiri di atas penciptaan atas manusia telanjang yang tidak memiliki hak untuk memiliki hak-hak (Giorgio Agamben, 1998:6).

Homo sacer adalah manusia yang tereduksi dalam hidup-telanjang, maka situasi dimana ketelanjangan hidup itu adalah *zone of indistinction*, satu area abu-abu dimana manusia berada di dalam sekaligus di luar dari sistem hukum ataupun kedaulatan itu sendiri (Rian Adhivira Prabowo, 2015:31). Situasi itu adalah apa yang disebut sebagai *state-of-exception*, semacam keadaan darurat negara atau situasi genting lain yang membahayakan kelangsungan dari kedaulatan itu sendiri. Atas nama keadaan genting tersebut, negara atas nama penjagaan hak, merampas hak. Hanya saja, aktivasi dari keadaan genting itu sendiri tidaklah bersifat jelas pada dirinya, melainkan dapat diaktivasi sewaktu-waktu melalui dia yang meneguhkan kedaulatan. Maka inilah ambiguitas dari penjaminan hak dari negara; hak yang abstrak yang hanya bisa berlaku apabila dijamin, dapat ditunda keberadaan ataupun pemenuhannya melalui langkah peneguhan kedaulatan dalam keadaan genting. Dengan demikian perspektif Agamben ini menunjukkan hukum yang merupakan tempat penjaminan dan bahkan pendefinisian baku dari apa yang disebut sebagai hak asasi manusia itu sendiri bukanlah sesuatu yang berlaku dengan sendirinya sedemikian pasti. Hukum pada situasi genting tersebut dapat diaktivasi sewaktu-waktu melalui peneguhan kedaulatan, yang atas nama penjagaan hak merampas hak tersebut. Namun inilah sesungguhnya letak persinggungan antara hukum dan hidup. Situasi inilah yang merupakan prakondisi dari *hominus sacri* yang muncul sebagai eksekusi dari suksesi

peneguhan kedaulatan yang menentukan batas-batas identitas dari mana yang termasuk dan mana yang bukan dalam keanggotaan satu komunitas politik (Rian Adhivira Prabowo, 2015:31-32).

Hak asasi manusia seringkali dipandang sebagai hak yang inheren atau melekat secara otomatis pada segala entitas yang disebut sebagai manusia. Bahwa manusia dalam keadaan apapun memiliki kualitas tertentu yang tidak dapat dikurangi sedikitpun. Pada kenyataannya, apa yang disebut sebagai hak asasi manusia itu sendiri mengandaikan manusia yang bersifat abstrak. Sementara manusia pada sisi lain memerlukan situasi kongkret dimana hak-hak tersebut dapat diwujudkan atau dengan kata lain, hak-hak yang abstrak tersebut tidak dapat dijamin apabila tidak terikat pada entitas tertentu yaitu negara. Mengandaikan bahwa satu hak ada begitu saja dan menjamin batas-batas kemanusiaan, bagaimanapun adalah tidak mungkin apabila tidak terikat oleh hukum dalam satu kedaulatan negara tertentu. Tanpa adanya keterikatan pada suatu komunitas politik tertentu, maka tidak ada jaminan atas hak-hak, bahkan pada manusia yang sebelumnya dikatakan memiliki hak yang melekat pada dirinya. Kondisi tidak adanya pemilikan atas hak menunjukkan bahwa setidaknya terdapat satu hak primordial yang menandai rekognisi atas hak asasi manusia yang disebut sebagai “hak untuk memiliki hak” dimana hak tersebut diperoleh melalui keanggotaan dalam suatu komunitas politik tertentu (F. Budi Hardiman, 2012:29).

B. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Skematik Kerangka Pemikiran

Keterangan :

Kerangka pemikiran di atas menjelaskan alur pemikiran penulis dalam mengangkat, menggambarkan, menelaah, menjabarkan serta menemukan jawaban atas permasalahan hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sendiri merupakan landasan yuridis formal dalam sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia yang berupaya memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam peradilan pidana. dari mulai tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga tahap pemidanaan, setiap orang baik korban maupun tersangka mendapatkan perlindungan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Di dalam proses penyidikan tidak disebutkan secara jelas berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh penyidik untuk menyelesaikan proses penyidikannya atau dengan kata lain ketidakjelasan kapan waktu proses penyidikan itu berakhir. Ketiadaan batasan waktu dalam proses penyidikan menyebabkan muncul fenomena *homo sacer* (manusia tanpa hak). Ketiadaan batasan waktu dalam proses penyidikan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tersangka dan berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia bagi tersangka. Tidak adanya pengaturan secara khusus mengenai berapa lama waktu penyidikan berlangsung memicu permasalahan munculnya fenomena *homo sacer* (manusia tanpa hak) di dalam proses penyidikan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Potensi Munculnya Fenomena *Homo Sacer* (Manusia Tanpa Hak) Ketika Batasan Waktu Proses Penyidikan Tidak Ada

Berdasarkan kajian literasi yang telah dilakukan oleh penulis pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dapat dilihat bahwa ketika seseorang menyandang status sebagai seorang tersangka maka proses penyidikan dalam ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut ternyata tidak memiliki batasan waktu. Dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dikatakan bahwa:

“Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum”

kemudian dalam Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga diatur bahwa:

“Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada Penuntut Umum”

Pada ketentuan kedua pasal tersebut sama sekali tidak menunjukkan kapan batasan waktu proses penyidikan itu berakhir, kecuali ketentuan dalam Pasal 110 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa:

“Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari Penuntut Umum kepada Penyidik”

namun berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana apabila penuntut umum menganggap hasil penyidikan perlu dilengkapi maka penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum maka ketentuan limitasi waktu selama 14 (empat belas) hari tersebut tidak ada lagi.

Hal inilah yang kemudian dimungkinkan adanya waktu yang sangat panjang untuk memberikan sebuah kepastian bagi seseorang apakah dia berhak atas proses hukum yang layak atau tidak. Pembacaan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana demikian yang ternyata tidak mengatur tentang pembatasan waktu bagi seseorang ketika ditetapkan menjadi tersangka dalam kacamata Giorgio Agamben disebut sebagai manusia tanpa hak (*homo sacer*).

Giorgio Agamben dalam bukunya berjudul *Homo Sacer; Sovereign Power and Bare Life* menjelaskan beberapa konsepsi yang menyusun munculnya istilah *homo sacer*, antara lain : 1) *bios* dan *zoe*; 2) *bare life*; 3) *zone of indistinction*; dan 4) *state of exception*. Untuk memahami bagaimana seorang tersangka menjadi manusia tanpa hak (*homo sacer*) maka pembahasan selanjutnya akan membedah lebih jauh mengenai 1) *bios* dan *zoe*; 2) *bare life*; 3) *zone of indistinction*; serta 4) *state of exception*.

1. Manusia yang Bergeser dari *Bios* Menjadi *Zoe*

Bios menunjukkan cara hidup yang layak oleh individu maupun kelompok, yang berarti hidup publik sebagaimana terdapat dalam masyarakat polis sedangkan kata *zoe* menunjukkan hidup “sebagaimana mestinya”, hidup untuk bertahan hidup selayaknya yang dilakukan oleh makhluk hidup pada umumnya. (Giorgio Agamben, 1998:1). *Bios* yang merupakan bagian dari masyarakat politik dengan hak publik yang penuh dihadapkan dengan *zoe* yang merupakan manusia dengan kualitas

kemanusiaannya berupa pemenuhan kebutuhan biologi semata. Maka apa yang disebut dengan *homo sacer* adalah degradasi kualitas manusia dari *bios* menjadi *zoe*.

Pada dasarnya manusia memiliki hak dasar yang secara kodrati melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak dasar tersebut dimiliki sejak lahir serta berlaku kapanpun, dimanapun dan kepada siapapun sehingga sifatnya universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Hak dasar tersebut bernama hak asasi manusia. Dalam *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa manusia memiliki 30 (tiga puluh) macam hak asasi manusia yang secara garis besar dibagi menjadi Hak Asasi Pribadi (*Personal Rights*), Hak Asasi Politik (*Political Rights*), Hak Asasi Hukum (*Legal Equality Rights*), Hak Asasi Ekonomi (*Property Rights*), Hak Asasi Peradilan (*Procedural Rights*), dan Hak Asasi Sosial Budaya (*Social Culture Rights*).

Bahwa lebih lanjut Hak Asasi Manusia diatur dalam Pasal 28A sampai dengan 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjadi landasan hukum bagi seluruh warga negara Indonesia untuk menggunakan hak-haknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mencermati Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat....”

di sini berarti manusia memiliki derajat yang tinggi serta memiliki hak yang penuh sebagai seseorang yang memiliki kebebasan.

Namun ketika seseorang tersebut melakukan pelanggaran yang selanjutnya dicap sebagai kejahatan, yang di dalam kejahatan tersebut ada niat buruk (*mens rea*) dan kemudian diaplikasikan dalam tindakan awal, bahkan selesai atau tidak selesainya tindak tersebut dilakukan, sehingga delik itu terpenuhi. Maka ketika hal tersebut dilakukan, seseorang itu terperangkap dari yang semula menjadi manusia bebas dengan segala kepenuhan haknya berubah menjadi manusia yang berhadapan dengan hukum. Pada konteks demikian, otomatis seseorang tersebut harus mengikuti proses hukum dan menanti untuk dijatuhi hukuman.

Seperti diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak saja memuat tentang hak dan kewajiban yang menjadi tugas dan kewenangan institusi penegak hukum tetapi juga memuat tata cara proses pidana untuk menjamin hak asasi manusia khususnya mereka yang sedang berhadapan dengan hukum (Robi Harianto S, Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 2011:100). Dalam proses peradilan pidana, tersangka wajib mendapatkan hak-haknya yang ditujukan untuk melindungi tersangka di tingkat penyidikan. Perlindungan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dirumuskan dalam 10 (sepuluh) asas, yang terdiri dari asas-asas umum dan asas-asas khusus. Asas-asas umum tersebut antara lain: (1) perlakuan yang sama di depan hukum tanpa diskriminasi apapun; (2) praduga tak bersalah; (3) hak untuk memperoleh kompensasi dan rehabilitasi; (4) hak untuk mendapatkan bantuan hukum; (5) hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan; (6) peradilan yang bebas dari intervensi berbagai pihak dan dilakukan secara cepat, murah dan sederhana; (7) peradilan yang terbuka untuk umum sedangkan asas-asas yang bersifat khusus antara lain: (1) pelanggaran hak-hak individu (penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah,

penyitaan dan pemeriksaan surat) harus didasarkan undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah; (2) hak tersangka untuk diberitahukan persangkaan dan pendakwaan terhadapnya; dan (3) kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya (Agus Raharjo, Angkasa, dan Hibnu Nugroho, 2013:66).

Dalam proses pemeriksaan, tersangka belum tentu bersalah dan karenanya wajib dianggap tidak bersalah sesuai dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang merupakan cita-cita atau harapan agar setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan pengadilan dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Muhammad Schinggyt Tryan P, Nyoman Serikat Putrajaya, dan Pujiyono, 2016:4). Namun dengan tidak adanya batasan waktu dalam proses penyidikan menyebabkan seseorang telah terperangkap dari manusia yang mempunyai hak penuh menjadi turun derajatnya. Maka di sini terjadi pergeseran dari *bios* menjadi *zoe* yaitu pergeseran status dari manusia yang mempunyai hak penuh atas kebebasannya menjadi seseorang yang turun derajatnya.

2. Hidup Telanjang (*Bare Life*)

Lazimnya hidup “natural” dari para *zoe* terpisah dari *bios* yang merupakan hidup yang penuh. Hanya saja, letak hubungan antara *bios-zoe* adalah bahwa pada titik ini status kepenuhan manusia (*bios*) dapat dihilangkan, membuang mereka pada kehidupan apa adanya (*mere life*) menjadi manusia telanjang (*bare life*) yang hidup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya semata dan yang nyawanya sewaktu-waktu dapat dihilangkan (*zoe*). Lebih lanjut manusia telanjang (*bare life*) merupakan manusia yang telah kehilangan hak-hak publik-politiknya menjadi manusia privat. Mereka hidup diantara dua kaki, di dalam sekaligus di

luar hukum, mereka terlahir dari momen penciptaan hukum dan sekaligus berada di luar mengingat kualitas kemanusiaannya dipreteli habis sehingga hilang sudah hidup politiknya (Rian Adhivira, 2015:4). Maka apa yang disebut sebagai *homo sacer* adalah degradasi kualitas manusia dari hidup yang penuh menjadi hidup telanjang (*bare life*). Atau dengan kata lain manusia yang secara figur masih dapat dicap sebagai manusia namun tidak memiliki kapasitas untuk berfungsi sebagai manusia yang sesuai dengan tuntutan suatu kelompok masyarakat (Ferdinand Indrajaya, 2011:338).

Degradasi ini menunjukkan pula posisi hukum dan hidup, bahwa pada satu sisi hukum dengan sisi punitifnya berlaku, ditegakkan yang dalam penegakannya tersebut relevansi antara tindakan dan hukum sesungguhnya tidak lagi ada, secara politik barangkali tindakan tersebut legitim dan legal, namun jangkar pendasaran dari tindakan tersebut berlaku dengan menyingkirkan yang bukan anggota dengan satu marka tanda tertentu yang membedakan dari komunitas dalam *bios*, ketiadaan identitas dalam batas identitas inilah yang merupakan hidup telanjang (*bare life*) (John Lechte dan Saul Newman, 2013:63). Agamben menarik batas keduanya lebih jauh lagi, momen-momen penciptaan manusia telanjang tersebutlah yang merupakan pondasi tersembunyi dari kedaulatan atau dengan kata lain apa yang disebut sebagai kedaulatan itu sendiri adalah berdiri di atas penciptaan atas manusia telanjang yang tidak memiliki hak untuk memiliki hak-hak (Giorgio Agamben, 1998:6).

Giorgio Agamben melihat secara kritis bagaimana representasi biopolitik modern dalam tata kelola masyarakat yang cenderung memisahkan antara mereka yang berada dalam *zoe* (*bare life*) dan mereka yang berada dalam *bios* (*political existence*). Kecenderungan tersebut berimplikasi terhadap hak-hak warga dalam suatu negara. Kecenderungan

tersebut tidak saja bersifat politis semata tetapi juga menyangkut “hak hidup” seseorang sebagai warga negara. Agamben mengkritik kecenderungan tata kelola masyarakat modern (*governmentality*) yang cenderung menciptakan garis pemisah antara mereka yang layak mendapatkan tempat (*bios*) dengan mereka yang tidak layak (*bare life*).

Mencermati kembali bahwa manusia pada dasarnya memiliki Hak Asasi Pribadi (*Personal Rights*), Hak Asasi Politik (*Political Rights*), Hak Asasi Hukum (*Legal Equality Rights*), Hak Asasi Ekonomi (*Property Rights*), Hak Asasi Peradilan (*Procedural Rights*), dan Hak Asasi Sosial Budaya (*Social Culture Rights*). Maka ketika manusia melakukan tindak pidana, penyidik berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan artinya bahwa di sini manusia tidak lagi memiliki hak atas kebebasannya. Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penahanan tersebut dapat berupa penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah dan penahanan kota. Penahanan rumah tahanan negara dilaksanakan di rumah tahanan negara. Penahanan rumah dilakukan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka dengan mengadakan pengawasan terhadapnya guna menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam pemeriksaan. Penahanan kota dilakukan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka dengan kewajiban untuk melapor pada waktu yang ditentukan. Penahanan tersebut dapat dialihkan dari satu jenis penahanan kepada jenis penahanan lainnya (Berlian Simarmata, 2010:77).

Bahwa ketiga konsep bentuk penahanan tersebut sama-sama merenggut kebebasan seorang manusia. Proses penyidikan yang tidak memiliki batasan waktu juga menyebabkan penahanan dalam penyidikan

menjadi tidak terbatas waktunya. Padahal dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. Hak tersangka yang diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ini berguna untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seseorang yang disangka melakukan tindak pidana, terutama bagi mereka yang dikenakan penahanan sehingga tidak timbul suatu kesan tidak adanya kepastian hukum serta adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar dari penyidik (Martiman Prodjohamidjojo, 1984:22).

3. *Zone of Indistinction*

Homo sacer adalah manusia yang tereduksi kualitas kemanusiaannya dari *bios* yang merupakan bagian dari masyarakat politik dengan hak publik yang penuh kepada *zoe* yang merupakan manusia dengan kualitas kemanusiaannya yang berupa pemenuhan kebutuhan biologi semata. Maka apa yang disebut sebagai *homo sacer* adalah degradasi kualitas manusia dari *bios* kepada *zoe*, dari hidup penuh menjadi hidup telanjang (*bare life*) dimana situasi ketelanjangan hidup itu adalah *zone of indistinction*. *Zone of indistinction* yaitu satu area abu-abu dimana manusia berada di dalam sekaligus di luar dari sistem hukum ataupun kedaulatan itu sendiri (Rian Adhivira Prabowo, 2015:31).

Penegakan hukum pidana seringkali menjadi dilema, tarik menarik antara perlindungan kepentingan umum dengan perlindungan kepentingan individu. Pada satu sisi manusia menginginkan perlindungan agar tidak menjadi korban kejahatan atau jika sudah menjadi korban, berharap pelakunya dapat diproses dengan hukum tetapi disisi lain manusia juga tidak menginginkan terjadinya gangguan terhadap hak-hak mereka

sebagai warga negara yang mempunyai hak asasi manusia akibat bekerjanya alat penegak hukum pidana yang dalam ini merupakan penyidik.

Seseorang yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana oleh penyidik berdasarkan bukti permulaan, maka statusnya dapat diubah menjadi tersangka. Sebagai seorang tersangka, manusia dapat dikenakan berbagai pembatasan terhadap kemerdekaan pribadinya seperti kebebasan bergerak. Dengan kondisi seperti ini seorang tersangka berhadapan dengan penyidik yang dibekali kewenangan tertentu oleh undang-undang, maka seorang tersangka akan nampak sebagai pihak yang sangat lemah.

Proses penyidikan sebagai bagian dari sub sistem peradilan pidana memiliki wewenang dan kuasa untuk mengupayakan tercapainya keadilan. Penyidik juga berperan penting dalam pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia, tetapi dalam prakteknya penyidik malah yang menjadi pelanggar hak-hak asasi bagi tersangka. Hal ini disebabkan karena besarnya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, sehingga dapat menimbulkan interpretasi hukum dan benturan antara kewenangan penyidik dan hak tersangka selama proses penyidikan (Suswanto, Slamet Suhartono dan Fajar Sugianto, 2017:44).

Dalam penegakan hukum pidana, penyidik berdasarkan Bab V Pasal 16 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diberikan kewenangan untuk melakukan upaya paksa yang dapat berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan dan pemeriksaan surat. Apabila penegakan hukum pidana terlalu mementingkan pemberian kewenangan kepada penyidik tanpa memperhatikan pemberian hak-hak warga negara khususnya kepada tersangka dikhawatirkan akan memunculkan potensi pelanggaran hak asasi manusia.

Di sinilah terjadi *zone of indistinction*, area abu-abu dimana penyidik menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diberikan kewenangan untuk melakukan upaya paksa namun disisi lain upaya paksa tersebut dapat merenggut hak asasi manusia terhadap kemerdekaan pribadinya sehingga seolah-olah menjadikan penyidik sebagai pihak yang berhak menentukan seorang tersangka bersalah atau tidak.

4. *State of Exception*

State of exception merupakan semacam keadaan darurat negara atau situasi genting lain yang membahayakan kelangsungan dari kedaulatan itu sendiri. Atas nama keadaan genting tersebut, negara atas nama penjagaan hak, merampas hak. Hanya saja, aktivasi dari keadaan genting itu sendiri tidaklah bersifat jelas pada dirinya, melainkan dapat diaktivasi sewaktu-waktu melalui dia yang meneguhkan kedaulatan. Maka inilah ambiguitas dari penjaminan hak dari negara; hak yang abstrak yang hanya bisa berlaku apabila dijamin, dapat ditunda keberadaan ataupun pemenuhannya melalui langkah peneguhan kedaulatan dalam keadaan genting. Dengan demikian perspektif Agamben ini menunjukan hukum yang merupakan tempat penjaminan dan bahkan pendefinisian baku dari apa yang disebut sebagai hak asasi manusia itu sendiri bukanlah sesuatu yang berlaku dengan sendirinya sedemikian pasti. Hukum pada situasi genting tersebut dapat diaktivasi sewaktu-waktu melalui peneguhan kedaulatan, yang atas nama penjagaan hak merampas hak tersebut. Namun inilah sesungguhnya letak persinggungan antara hukum dan hidup. Situasi inilah yang merupakan prakondisi dari *hominus sacri* yang muncul sebagai akses dari suksesi peneguhan kedaulatan yang menentukan batas-batas identitas dari mana

yang termasuk dan mana yang bukan dalam keanggotaan satu komunitas politik (Rian Adhivira Prabowo, 2015:32-33).

Menurut Agamben, *state of exception* pada dasarnya bukanlah semacam hukum yang tersendiri, justru ia sebenarnya mengambil bentuk penundaan terhadap hukum itu sendiri. Dengan itu ia menempati posisi yang unik, ia tidak ada di dalam hukum tetapi juga bukan sama sekali di luar hukum (Rian Adhivira, 2015:2). Agamben menilai bahwa kepolitikan terus mendaur ulang konsepsi *state of exception* sebagai sarana pragmatis menjalankan kehidupan umum. Akibatnya, selama kedaulatan terus dimaknai sebagai kekuasaan untuk menentukan dan memutuskan dalam kedaruratan, selama itu pula penyingkiran hak asasi, kedurjanaan terhadap harkat martabat manusia terus dimungkinkan. Mereka yang ada dalam satu posisi dimana tidak adanya jaminan dari komunitas politik tempat hak untuk memiliki hak-hak digantungkan, yang pada satu sisi mereka adalah manusia yang berada dalam satu ruang lingkup kedaulatan tertentu namun pada sisi lain sekaligus mengalami eksklusi dari komunitas politik tersebut oleh Agamben disebut sebagai *homo sacer* (Rian Adhivira Prabowo, 2015:31).

Hukum pidana merupakan hukum publik yaitu hukum yang berperan mengatur kepentingan publik (masyarakat umum), dimana dari pengertian tersebut didapatkan ciri bahwa hukum publik mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan orang perorangan; kedudukan penguasa negara adalah lebih tinggi dari orang perorangan; dan proses hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak bergantung kepada orang perorangan (yang dirugikan) melainkan pada umumnya negara/penguasa berdasarkan kewenangannya (Andi Sofyan dan Nur Aziza, 2016:6). Penegakan hukum pidana dijalankan berdasarkan asas *the right due process of law* yaitu bahwa

setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan “persyaratan konstitusional” serta harus “menaati hukum”, oleh karena itu prinsip *due process of law* tidak membolehkan pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih untuk menegakkan bagian hukum yang lain. Artinya harus ada keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak asasi seorang yang diduga melakukan tindak pidana (Suswantoro, Slamet Suhartono dan Fajar Sugianto, 2018:48).

Negara yang keberadaannya diwakilkan oleh penegak hukum dan dalam hal penyidikan dilakukan oleh penyidik diberi kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan upaya paksa. Upaya paksa sendiri adalah bentuk tindakan yang dapat dipaksakan oleh penegak hukum pidana terhadap kemerdekaan dan kebebasan seseorang untuk bergerak maupun untuk memiliki dan menguasai sesuatu barang ataupun terhadap kemerdekaan pribadinya untuk tidak mendapat gangguan terhadap siapapun. Tindakan berupa upaya paksa tersebut diperlukan untuk memperlancar proses pemeriksaan ataupun untuk mengumpulkan bahan pembuktian (M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, 2012:94). Kewenangan upaya paksa yang diberikan kepada penyidik diatur dalam Bab V Pasal 16 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dimana upaya paksa tersebut dapat berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan dan pemeriksaan surat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memandang tersangka bukan sebagai objek hukum tetapi sebagai subjek hukum yang dalam posisi dan kedudukannya harus diperlakukan sesuai nilai-nilai luhur kemanusiaan, sehingga sebagai subjek hukum,

tersangka mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga dikenal sebagai undang-undang yang menjamin hak asasi manusia, dimana untuk mengakomodasi hak asasi manusia tersebut dituangkan dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 sebagai hak-hak tersangka. Penyidik wajib menjamin terlaksananya hak-hak seorang tersangka selama proses penyidikan berlangsung dalam perkara pidana.

Di sinilah terjadi dilema, sekalipun penegakan hukum memang menjadi suatu keharusan yang tidak bisa ditawar, tetapi hak-hak asasi tersangka juga tidak boleh diabaikan dan dilanggar. Bahwa disatu sisi negara atas nama penjagaan hak melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan jaminan atas hak-hak yuridis tersangka namun disisi lain meskipun untuk memperlancar pemeriksaan dan untuk mengumpulkan bukti, negara melalui penegak hukum yang dalam hal ini penyidik, merampas hak tersangka dengan upaya paksa tersebut.

B. Telaah Kondisi Ideal Atas Permasalahan Munculnya Fenomena *Homo Sacer* (Manusia Tanpa Hak) dalam Proses Penyidikan

Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti yang dengan alat bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Lamanya waktu penyidikan tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya dikatakan bahwa:

“Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum”

kemudian dalam Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga diatur bahwa:

“Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada Penuntut Umum”

Berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut sama sekali tidak menunjukkan kapan batasan waktu proses penyidikan itu berakhir, kecuali ketentuan dalam Pasal 110 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa:

“Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari Penuntut Umum kepada Penyidik”

namun berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana apabila penuntut umum menganggap hasil penyidikan perlu dilengkapi maka penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum maka ketentuan limitasi waktu selama 14 (empat belas) hari tersebut tidak ada lagi.

Apabila proses penyidikan berlangsung dalam jangka waktu yang lama ditambah ketidakjelasan lamanya waktu penyidikan, hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tersangka dan melanggar hak asasi manusia bagi tersangka serta dapat menimbulkan kesewenang-wenangan penegak hukum, padahal hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjamin pemenuhan hak-hak tersangka yang dituangkan dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68.

Berdasarkan kajian literasi, penulis menemukan peraturan yang mengatur batasan waktu penyelenggaraan penyidikan berdasarkan pertimbangan tingkat kesulitan penyidikan yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di dalam Pasal 31 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa:

- (1) Batas waktu penyelesaian perkara ditentukan berdasarkan kriteria tingkat kesulitan atas penyidikan:
 - a. Sangat sulit;
 - b. Sulit
 - c. Sedang; atau
 - d. Mudah
- (2) Batas waktu penyelesaian perkara dihitung mulai diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan meliputi:
 - a. 120 (seratus dua puluh) hari untuk penyidikan perkara sangat sulit;
 - b. 90 (sembilan puluh) hari untuk penyidikan perkara sulit;
 - c. 60 (enam puluh) hari untuk penyidikan perkara sedang; atau
 - d. 30 (tiga puluh) hari untuk penyidikan perkara mudah.
- (3) Dalam hal menentukan tingkat kesulitan penyidikan, ditentukan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah penyidikan.
- (4) Penentuan tingkat kesulitan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut menyatakan

bahwa lamanya proses penyelesaian perkara di tingkat penyidikan didasarkan pada mudah atau tidaknya suatu tindak pidana yaitu 120 (seratus dua puluh) hari untuk perkara sangat sulit, 90 (sembilan puluh) hari untuk perkara sulit, 60 (enam puluh) hari untuk perkara sedang dan 30 (tiga puluh) hari untuk perkara mudah. Namun dalam menentukan batas waktu penyelesaian perkara tidak didasarkan oleh kriteria apapun dan tidak dijelaskan batasan perkara yang mudah dan sulit itu seperti apa. Batasan waktu penyelesaian perkara hanya didasarkan oleh subjektivitas pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah penyidikan. Hal ini dapat menimbulkan kesewenang-wenangan pejabat yang menerbitkan surat perintah penyidikan tersebut.

Bahwa rumusan Pasal 31 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak bisa dijadikan dasar batasan waktu penyelesaian perkara karena menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Artinya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak bisa digunakan oleh penyidik pegawai negeri sipil sebagai dasar batasan waktu penyelesaian perkara dan hanya penyidik dari pejabat polisi Negara Republik Indonesia saja yang tunduk pada ketentuan peraturan tersebut.

Selain itu, juga terdapat Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/A/JA/02/2009 tentang Meminimalisir Bolak-Baliknya Perkara Antara Penyidik dan Penuntut Umum. Dalam surat edaran tersebut pada ketentuan nomor 3 disebutkan bahwa:

“apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SPDP, penyidik belum menyampaikan hasil penyidikan, Kajati/Kajari/Kacabjari agar meminta perkembangan hasil penyidikan kepada penyidik dengan menerbitkan P-17”

Dalam ketentuan nomor 4 juga menyatakan bahwa:

“apabila berdasarkan hasil penelitian Jaksa Penuntut Umum terhadap berkas perkara ditemukan adanya kekurangan, dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berkas perkara, Jaksa Penuntut Umum memberitahukan hal tersebut kepada penyidik, dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya penyerahan tahap pertama, Jaksa Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara tersebut untuk disertai petunjuk yang harus dilengkapi”

Berdasarkan ketentuan nomor 3 dan 4 Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/A/JA/02/2009 tentang Meminimalisir Bolak Baliknya Perkara Antara Penyidik dan Penuntut Umum, penuntut umum menghendaki dilakukannya proses penyidikan selama 30 (tiga puluh) hari dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut penyidik harus melimpahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Apabila ditemukan adanya kekurangan dalam berkas perkara maka dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya berkas perkara, penuntut umum mengembalikan berkas perkara tersebut disertai petunjuk kepada penyidik untuk dilengkapi. Namun dalam ketentuan nomor 3 tidak dijelaskan mengapa proses penyidikan harus selesai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Selain itu, surat edaran bukan merupakan peraturan perundang-undangan, bukan juga keputusan tata usaha negara, melainkan hanya sebuah instrumen administratif yang bersifat internal untuk memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai suatu norma peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Ini berarti Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/A/JA/02/2009 tentang Meminimalisir Bolak Baliknya Perkara Antara Penyidik dan Penuntut Umum hanya berlaku dalam internal institusi kejaksaan.

Benar bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/A/JA/02/2009 tentang Meminimalisir Bolak Baliknya Perkara Antara Penyidik dan Penuntut Umum merupakan produk hukum yang isinya secara materiil mengikat internal institusi saja, namun kedua ketentuan tersebut bersifat *under legislation* karena bukanlah peraturan perundang-undangan dan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Kejaksaan Republik Indonesia tidak memiliki kewenangan membentuk ketentuan tersebut menjadi peraturan perundang-undangan. Selain itu kedua ketentuan tersebut juga bersifat parsial karena adanya ego sektoral, bisa saja kedua ketentuan tersebut saling bertentangan yang menyebabkan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia memiliki aturan sendiri-sendiri dalam penegakkan hukum sehingga ditakutkan kedua ketentuan tersebut akan menjadi penghalang dalam menjalin kerjasama penegakkan hukum.

Menurut penulis, kondisi ideal atas permasalahan munculnya fenomena *homo sacer* dalam proses penyidikan adalah dengan tidak terlalu awal melakukan penetapan tersangka. Pada saat ada laporan terjadinya tindak pidana, penyidik jangan terburu-buru melakukan penetapan tersangka, tetapi cukup menjadikan seseorang tersebut sebagai terlapor. Memang konsep terlapor ini menjadikan penyidik seperti tidak menindaklanjuti laporan terjadinya tindak pidana tersebut, tetapi disisi lain konsep terlapor merupakan “*win-win solution*” dimana disatu sisi penyidik masih memiliki waktu untuk mencari alat bukti yang cukup guna merubah status terlapor menjadi tersangka dan konsep terlapor ini juga tidak merugikan seorang terlapor karena hak asasi manusianya tidak terenggut melalui upaya-upaya paksa dalam proses penyidikan. Selain itu, untuk meminimalisir munculnya

fenomena *homo sacer* dalam proses penyidikan yaitu dengan mengatur batasan waktu proses penyidikan. Di sinilah diperlukan pembaharuan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terkait dengan batasan waktu penyidikan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, ketentuan yang mempunyai batasan waktu hanya masa penahanan. Maka menurut penulis, jangka waktu penahanan dapat dijadikan sebagai acuan batasan waktu yang ideal dalam proses penyidikan. Jangka waktu penahanan diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Jangka Waktu Penahanan

No.	Tingkat Penahanan	Pihak Yang Berwenang Melakukan Penahanan	Maksimal Jangka Waktu Penahanan	Perpanjangan Jangka Waktu Penahanan
1.	Penyidikan	Penyidik, dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum.	20 (dua puluh) hari	40 (empat puluh) hari
2.	Penuntutan	Penuntut Umum, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri	20 (dua puluh) hari	30 (tiga puluh) hari

3.	Pemeriksaan di Pengadilan Negeri	Hakim Pengadilan Negeri, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri	30 (tiga puluh) hari	60 (enam puluh) hari
4.	Pemeriksaan di Pengadilan Tinggi	Hakim Pengadilan Tinggi, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi	30 (tiga puluh) hari	60 (enam puluh) hari
5.	Pemeriksaan di Mahkamah Agung	Hakim Mahkamah Agung, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung	50 (lima puluh) hari	60 (enam puluh) hari

Berdasarkan tabel tersebut, jangka waktu penahanan dalam tingkat penyidikan berlangsung selama 60 (enam puluh) hari, maka maksimal lamanya proses penyidikan pun harus sudah selesai dalam kurun waktu 60

(enam puluh) hari tersebut. Dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari, penyidik sudah harus melimpahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Hal ini merupakan perwujudan jaminan hak tersangka yang terdapat dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya perkara tersebut dapat diajukan kepada penuntut umum sedangkan jika proses penyidikan tidak selesai dalam kurun waktu tersebut, maka penyidik demi hukum harus membebaskan tersangka dan menerbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) sehingga dengan diaturnya batasan waktu penyidikan terdapat kepastian hukum bagi tersangka dan adanya jaminan hak asasi tersangka dalam proses penyidikan, karena tanpa adanya kepastian tersebut bisa saja seseorang berstatus tersangka seumur hidupnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka simpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Menurut pemikiran Agamben, *homo sacer* disusun berdasarkan beberapa konsepsi, antara lain:
 - a. Pergeseran manusia dari *bios* ke *zoe*, yaitu kondisi dimana pada awalnya manusia memiliki hak penuh akan kebebasannya tetapi karena manusia tersebut berstatus tersangka maka hak-hak atas kebebasannya terenggut;
 - b. Hidup telanjang (*bare life*), yaitu kondisi dimana tersangka ditahan dan penahanan tersebut merenggut hak kebebasannya sebagai manusia;
 - c. *Zone of Indistinction*, yaitu area abu-abu dimana disatu sisi penyidik diberi kewenangan untuk melakukan upaya paksa namun disisi lain upaya paksa tersebut merenggut hak asasi manusia;
 - d. *State of Exception*, yaitu kondisi dimana negara atas nama penjagaan hak dapat merampas hak. Negara melalui penegak hukum yang dalam hal ini penyidik melakukan penegakan hukum melalui upaya paksa dalam proses penyidikan, namun upaya paksa tersebut nyatanya dapat merampas hak asasi manusia.

Kondisi-kondisi tersebut menyebabkan munculnya *homo sacer*, ditambah dengan tidak diaturnya batasan waktu proses penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka akan sangat berpotensi memunculkan fenomena-fenomena *homo sacer* (manusia tanpa hak) dalam proses penyidikan.

2. Kondisi ideal atas permasalahan munculnya fenomena *homo sacer* yaitu dengan melakukan pengaturan terhadap batasan waktu proses penyidikan. Pengaturan batasan waktu proses penyidikan tersebut dapat didasarkan pada lamanya waktu penahanan dalam proses penyidikan. Menurut Pasal 24 Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, lamanya waktu penahanan dalam proses penyidikan yaitu 60 (enam puluh) hari, maka selama 60 (enam puluh) hari itu juga batasan waktu proses penyidikan sudah harus selesai dan penyidik melimpahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Disisi lain, apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari proses penyidikan tidak selesai, maka penyidik demi hukum harus membebaskan tersangka dan menerbitkan SP3 (Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan).

B. Saran

Berdasarkan dengan pembahasan telaah kritis potensi munculnya fenomena *homo sacer* pada ketiadaan batasan waktu dalam proses penyidikan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diperlukan pembaharuan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengenai batasan waktu penyidikan. Ketentuan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi tersangka dan jaminan tidak terlanggarnya hak-hak tersangka dalam proses penyidikan. Ketentuan tersebut juga dapat menjadikan proses penyidikan tidak berlarut-larut. Apabila tidak diatur batasan waktu proses penyidikan, maka bisa saja seseorang berstatus sebagai tersangka seumur hidupnya.
2. Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia harus melakukan penegakkan hukum berdasarkan Undang-Undang yang ada tanpa membuat aturan baru yang bersifat *under legislation* dan parsial.

Apabila pengaturan mengenai batasan waktu tidak ada, maka Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia dapat mendesak badan legislatif untuk memasukkan batasan waktu proses penyidikan tersebut ke dalam RUU KUHAP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Andi Hamzah. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan dan Nur Aziza. 2016. *Bahan Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- F. Budi Hardiman. 2012. *Hak-Hak Asasi Manusia; Polemik dengan Agama dan Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Giorgio Agamben. 1998. *Homo Sacer; Sovereign Power and Bare Life (edisi terjemahan oleh Daniel Heller-Roazen)*. California: Stanford University Press.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: PT Alumni.
- Martiman Prodjohamidjojo. 1984. *Kedudukan Tersangka dan Terdakwa dalam Pemeriksaan (Seri Pemerataan Keadilan)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- M. Husein Harun. 1991. *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu. 2012. *Wawasan Due Proses of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya dan Hasan Madani. 2004. *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum dan Penyidikan*. Yogyakarta: Liberty.
- P.A.F. Lamintang. 1997. *KUHAP dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*. Bandung: Sumur Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Jurnal

- Agus Raharjo, Angkasa, dan Hibnu Nugroho. 2013. "Rule Breaking dalam Penyidikan Untuk Menghindari Kekerasan yang Dilakukan Oleh Penyidik". *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 13, Nomor 1. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.
- Berlian Simarmata. 2010. "Menanti Pelaksanaan Penahanan dan Pidana Penjara yang Lebih Humanis di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*. Volume 7, Nomor 3. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Ferdinand Indrajaya. 2011. "Homo Sacer Sebagai Figur Politis dan Kaitannya dengan Dunia Pendidikan Tinggi". *Jurnal Humaniora*. Volume 2, Nomor 1. Jakarta: Universitas Bina Nusantara.
- John Lechte dan Saul Newman. 2013. "Agamben and The Politics of Human Rights, Statelessness, Images, Violence". *Edinburgh University Press Ltd*.
- Muhammad Schinggyt Tryan P, Nyoman Serikat Putrajaya dan Pujiyono. 2016. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Peradilan Pidana". *Diponegoro Law Journal*. Volume 5, Nomor 4. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Robi Harianto S, Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad. 2011. Kepastian Hukum Bagi Tersangka atau Terdakwa yang Dikeluarkan Demi Hukum. *Legalitas*. Volume 1, Nomor 4. Jambi: Universitas Batanghari.
- Suswanto, Slamet Suhartono dan Fajar Sugianto. 2018. "Perlindungan Hukum Bagi Tersangka dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia". *Jurnal Hukum Magnum Opus*. Volume 1, Nomor 1. Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945.

Artikel, Makalah dan lain sebagainya

- Rian Adhivira. 2015. Negara dan Produksi Manusia Telanjang : Membaca HAM melalui Giorgio Agamben.

Skripsi, Tesis dan Disertasi

- Rian Adhivira Prabowo. 2015. Homo Sacer 1965: Perampasan Hak dan Pelampauan Atasny. Tesis. Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum. Universitas Diponegoro. Semarang.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/A/JA/02/2009 tentang Meminimalisir Bolak Baliknya Perkara Antara Penyidik dan Penuntut Umum